



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON**  
JALAN CIDENG INDAH NO. 236A KEDAWUNG CIREBON JAWA BARAT  
TELEPON (0231) 248857  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bppmhkp.cirebon@kkp.go.id](mailto:bppmhkp.cirebon@kkp.go.id)

Nomor : B. 87/SKIPM.CRB/TU.210/I/2026 9 Januari 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengantar Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Yth. Plt. Sekretaris BPPMHKP  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
di Jakarta

Sehubungan dengan telah berakhirnya Triwulan IV Tahun 2025, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 Triwulan IV atas capaian indikator kinerja yang pelaksanaan kegiatan/komponennya telah diselesaikan selama periode Triwulan IV Tahun 2025. Berikut kami lampirkan Laporan Kinerja beserta lampirannya berupa Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Stasiun KIPM Cirebon,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

KKP  
2025

panganbiru

08  
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK  
INDONESIA EMAS

# LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM CIREBON

TRIWULAN IV

2  
0  
2  
5



Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

BPP  
MHKP CIREBON

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Capaian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja UPT Badan Mutu KKP Cirebon dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi untuk menilai capaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta dasar dalam perencanaan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai dan pihak terkait atas kerja sama dan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, laporan ini dapat menjadi acuan bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik di masa mendatang.

Cirebon, 9 Januari 2026  
Kepala Stasiun KIPM Cirebon,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Cirebon sebagai salah satu UPT Badan Mutu KKP dalam rencana kinerjanya akan mendukung pencapaian kinerja BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Stasiun KIPM Cirebon mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 15 IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPMHKP dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah diukur capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan total 15 IKU. Berdasarkan pengukuran kinerja dalam Aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Kinerja per Triwulan IV Tahun 2025 adalah 113,48%. Secara keseluruhan nilai kinerja organisasi (NKO) Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 113,48% atau masuk dalam kriteria Istimewa (biru), yaitu sebanyak 15 IKU yang wajib diukur telah mencapai/melebihi target, sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.585.116.904,00 atau 97,40% dari pagu anggaran revisi yang dikelola yaitu sebesar Rp9.841.258.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp256.141.096,00 atau 2,60%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 per akhir Desember yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar 93,86.

**Tabel 1 . Nilai capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun KIPM Cirebon**  
**Triwulan IV Tahun 2025**

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target TW IV	Capaian TW IV	%	Target s/d TW IV	Capaian s/d TW IV	%
<b>S.01</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>						<b>110,25</b>			<b>110,25</b>	
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	99,23	120	70	99,23	120
IKS.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pascapanen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	1	1	100	1	1	100
IKS.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	99	99	100	101	198	200	101
<b>S.02</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar</b>						<b>120</b>			<b>120</b>	
IKS.02.1	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup SKIPM Crb	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	93,89	120	75	93,89	120
IKS.02.2	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	91	120	75	91	120

S.03		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						108,39			108,39	
	IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	93,86	102	92	93,86	102
	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,5	71,5	92,5	120	71,5	92,5	120
	IKS.03.3	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100	100	100	100
	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	86,56	106	82	86,56	106
	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	88,2	103	86	88,2	103
	IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	85	85	100	118	85	100	118
	IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	76	100	120	76	100	120
	IKS.03.8	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	83,05	118	70	83,05	118
	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,36	3,36	3,63	108	3,36	3,63	108

Keterangan

NKO : 113,48 %

Tingkat capaian kinerja dibatasi sampai dengan 120% (Sumber : aplikasi kinerjaku.kkp.go.id)

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I. Latar Belakang	1
II. Arah Kebijakan	2
III. Dasar Hukum	3
IV. Tugas dan Fungsi	3
V. Agenda SKIPM Cirebon	4
VI. Dasar Pengukuran Kinerja	4
VII. Tujuan Pengukuran Kinerja	5
VIII. Ruang Lingkup	5
IX. Waktu Pengukuran Kinerja	5
X. Metodologi Pengukuran Kinerja	5
XI. Sistematika Penyajian	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>6</b>
I. Rencana Strategis	6
II. Rencana Kinerja Tahunan	8
III. Penetapan Kinerja Tahun 2025	9
IV. Program dan Kegiatan Tahun 2025	10
V. Rencana Aksi Pencapaian IKU	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>12</b>
I. Pengelolaan Kinerja	12
II. Capaian Kinerja	13
III. Realisasi Rencana Aksi	33
IV. Analisis Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran	34
V. Analisis Capaian Kinerja	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>37</b>
I. Kesimpulan	37
II. Permasalahan	37
III. Langkah Perbaikan	38
<b>LAMPIRAN</b>	<b>39</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

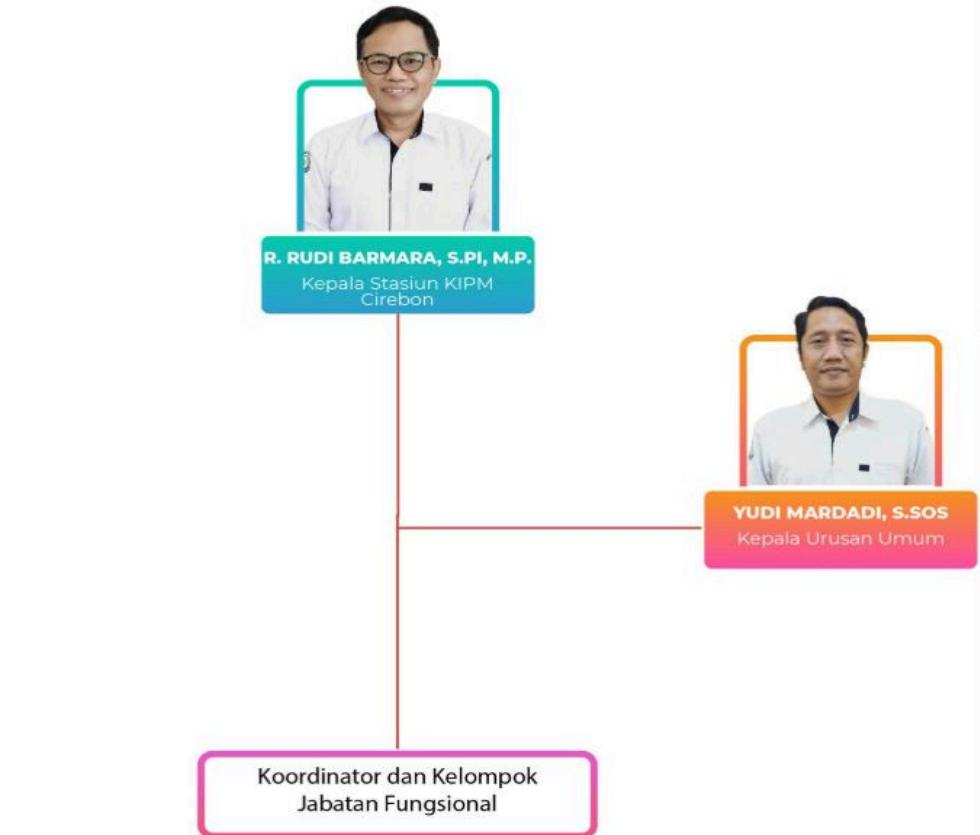
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Cirebon wajib melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun berjalan untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Cirebon. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan motivasi dalam peningkatan kinerja Stasiun KIPM Cirebon serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Stasiun KIPM Cirebon dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Para Katimja, JF tertentu dan JF Umum.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung Stasiun KIPM Cirebon saat ini berjumlah 40 orang pegawai terdiri dari 27 orang PNS, 3 orang PPPK, 9 orang PPPK Paruh Waktu (PW), dan 1 orang PJLP. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu, Stasiun KIPM Cirebon juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Struktur organisasi Stasiun KIPM Cirebon tergambar sebagaimana pada Gambar 1 berikut.



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON**  
(PermenKP No. 92/PERMEN-KP/2020)



**Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Cirebon**

## **II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN KIPM CIREBON**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Cirebon disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan dan strategi SKIPM Cirebon sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPPMHKP untuk mewujudkan tujuan organisasi dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian 5 Kebijakan Ekonomi Biru dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan (prioritas), yaitu :

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut;
2. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota;
3. Mengembangkan Budidaya Ikan Laut, Tawar, dan Payau yang Berkelanjutan;
4. Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
5. Penanganan Sampah Plastik di Laut melalui Bulan Cinta Laut (BCL).

Stasiun KIPM Cirebon sebagai UPT dari BPPMHKP bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Adapun strategi Stasiun KIPM Cirebon dalam rangka mendukung kebijakan KKP dan tugas fungsi BPPMHKP, yaitu :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kualitas dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
4. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

### **III. DASAR HUKUM**

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.

### **IV. TUGAS - FUNGSI**

Sampai dengan saat Laporan Kinerja Triwulan IV disusun, Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkup BPPMHKP – KKP belum terbit, sehingga Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan penerapan sistem manajemen mutu.

## **V. AGENDA STASIUN KIPM CIREBON**

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang mendukung kebijakan dan program KKP di lingkup Stasiun KIPM Cirebon adalah dengan melaksanakan kegiatan :

1. Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan (Pusat Mutu Produksi Primer dan Pusat Mutu Pascapanen).
2. Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Dukungan manajerial dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel.

## **VI. DASAR PENGUKURAN KINERJA**

1. Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 032.13.2.649732/2025, tanggal 2 Desember 2024.
6. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Revisi pada tanggal 8 Desember 2025.

## **VII. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja bertujuan untuk :

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama organisasi.

## **VIII. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup capaian kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Stasiun KIPM Cirebon dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Kepala BPPMHKP.

## **IX. WAKTU PENGUKURAN KINERJA**

1. Periode yang diukur : Oktober s.d. Desember 2025
2. Waktu pengukuran : 1 s.d. 10 Desember 2025

## **X. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan :

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis Dialog Kinerja (Matriks Peran Hasil/MPH) Tahun 2025.
2. Pemantauan atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU Tahun 2025.

## **XI. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyusunan laporan merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja, capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan realisasi rencana aksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.
- d. Bab IV – Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/ permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

# **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

## **I. RENCANA STRATEGIS**

Sejalan dengan dinamika organisasi yang ada di KKP, Renstra BPPMHKP menjadi dasar bagi Unit Pelaksana Teknis dibawahnya untuk menyusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis Matriks Peran Hasil (MPH) di lingkungan BPPMHKP dan KKP.

Visi KKP untuk mendukung visi Presiden "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Adapun visi – misi BPPMHKP dan Stasiun KIPM Cirebon berdasarkan Renstra dan turunannya, dapat disampaikan sebagai berikut :

### **1. Visi**

Visi Stasiun KIPM Cirebon yang mengacu pada Visi KKP adalah Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong."

### **2. Misi**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 dari 4 Misi KKP, yaitu: (1) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional; (2) Misi ke-3 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan (3) Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan

hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

### 3. Tujuan

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan Stasiun KIPM Cirebon sebagai UPT BPPMHKP yang mendukung/bertanggung jawab pada pencapaian agenda prioritas KKP dengan dua dari lima Kebijakan Ekonomi Biru, yaitu (a) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan (b) Mengembangkan Budidaya Air Laut, Tawar, Payau yang Berkelanjutan; dengan tujuan :

- a. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap mutu pangan nasional.
- b. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
- c. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

### 4. Sasaran Kegiatan

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 s.d. 2029, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai Stasiun KIPM Cirebon dari program yang dilaksanakan, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Pada Tahun 2025, mengacu Sasaran Kegiatan BPPMHKP Stasiun KIPM Cirebon menetapkan 3 sasaran kegiatan, sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar; dan
- c. Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

## II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

### 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama di lingkup **Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan**. Rincian outputnya adalah :

- a. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impornya (1 produk);
- b. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi (60 produk);
- c. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi (30 Lembaga);
- d. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (1 produk);
- e. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (15 Lembaga);
- f. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (1 rekomendasi);
- g. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan (1 kegiatan);
- h. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (1 rekomendasi kebijakan);
- i. Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (1 lembaga);
- j. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium (1 lembaga);
- k. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi (1 produk).

### 2. Program Dukungan Manajemen

Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan kegiatan/aktivitas utama Dukungan Manajemen dengan rincian output :

- a. Layanan Umum (1 layanan);
- b. Layanan Perkantoran (1 layanan);
- c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 layanan);
- d. Layanan Manajemen Keuangan (1 layanan);

### III. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	70 %
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	70 %
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	1 Lokasi
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	99 %
<b>Kegiatan 2. Manajemen Mutu</b>				
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	75 (nilai)
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	75 (nilai)
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal</b>				
SK 3	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	92 (nilai)
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	71,5 (nilai)
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	100 %
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	82 (Indeks)
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	86 (nilai)
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	85 %
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	76 %

		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	70 %
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	3,36 (indeks)

Sumber : PK yang telah ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP dan Kepala UPT pada Tahun 2025

#### IV. PROGRAM DAN KEGIATAN STASIUN KIPM CIREBON

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja BPPMHKP, Stasiun KIPM Cirebon melaksanakan 2 Program (3 Kegiatan), dengan rincian indikator kinerja komponen kegiatan, antara lain :

1. Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar;
2. Jumlah Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI;
3. Persentase MOU/MRA sistem jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan;
4. Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
5. Persentase unit usaha Pemberian Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan;
6. Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan;
7. Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan;
8. Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
9. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
10. Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi;
11. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
12. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
13. Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir;
14. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor;
15. Nilai Kinerja Anggaran;
16. Indeks Profesionalitas ASN;

17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
18. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP;
19. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP;
20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan;
21. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK;
22. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat; dan
23. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

## **V. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU**

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Cirebon telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai IKU dan target waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi, Stasiun KIPM Cirebon dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 sebagaimana pada Lampiran 2.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### I. PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka memantau capaian kinerja, manajemen melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan, diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi berbasis website [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai perkembangan capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Surat Tugas Kepala Stasiun KIPM Cirebon Nomor B. 27/SKIPM.CRB/KP.440/I/2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Tim Manajemen Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Cirebon.

Perhitungan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, akan dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Tabel 3. Rentang penilaian capaian kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Sesuai dengan pendekatan MPH, Sasaran Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya melalui capaian **15 IKU** dengan target yang ditentukan.

## II. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dari Oktober s.d. Desember 2025. Capaian kinerja yang diukur pada Triwulan IV Tahun 2025, target Sasaran dan IKU yang diukur menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya dalam periode s.d Triwulan IV Tahun 2025. Target Sasaran dan IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 tersaji pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan IKU/IK yang diukur pada Triwulan IV Tahun 2025

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target TW IV	Capaian TW IV	%	Target s/d TW IV	Capaian s/d TW IV	%
<b>S.01</b>		<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>						<b>110,25</b>			<b>110,25</b>	
	IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
	IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	99,23	120	70	99,23	120
	IKS.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pascapanen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	1	1	100	1	1	100
	IKS.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	99	99	100	101	198	200	101
<b>S.02</b>		<b>Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar</b>						<b>120</b>			<b>120</b>	
	IKS.02.1	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup SKIPM Crb	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	93,89	120	75	93,89	120

	IKS.02.2	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	91	120	75	91	120
<b>S.03</b>		<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				108,39				108,39		
	IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	93,86	102	92	93,86	102
	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,5	71,5	92,5	120	71,5	92,5	120
	IKS.03.3	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100	100	100	100
	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	86,56	106	82	86,56	106
	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	88,2	103	86	88,2	103
	IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Rata-rata	85	85	100	118	85	100	118
	IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	76	100	120	76	100	120
	IKS.03.8	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	83,05	118	70	83,05	118
	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,36	3,36	3,63	108	3,36	3,63	108

\*NKO 113,48%

Seluruh IKU/IK target pada Triwulan IV Tahun 2025 tersebut, telah dilakukan pengukuran baik secara manual (LCK) maupun menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja ([www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)). Pada Tabel 4, nilai capaian kinerja IKU Triwulan IV mencapai nilai **113,48%** secara keseluruhan (15 IKU), ditunjukan melalui skor kinerja sebesar **113,48%** yang masuk dalam kriteria **Istimewa** (biru). Hasil dari capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja atas 15 IKU yang diukur pada Triwulan IV Tahun 2025 telah memenuhi/ melebihi target yang ditetapkan.

Capaian kinerja yang dihasilkan dari kinerja masing – masing IKU, mendukung dan menjadi ukuran keberhasilan sasaran tersebut. Capaian kinerja masing – masing Indikator dari masing-masing Sasaran dan IKU dapat disampaikan sebagaimana berikut :

**SK 01**  
**Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan**

**IKU 1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Target persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dalam satu tahun anggaran sebesar 70% dengan rincian target sertifikasi CBIB pada Pembudidaya ikan sebanyak 3 sertifikat, CPIB pada pemberian ikan sebanyak 3 sertifikat, CPPIB sebanyak 2 sertifikat, CPOIB/CDOIB sebanyak 2 sertifikat, dan CPIB pada kapal perikanan sebanyak 20 sertifikat.

$$\text{Formula perhitungan IKU} = \% X = (A+B+C+D+E+F)/xn * 100\%$$

Keterangan :

% X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Capaian IKU 1 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW III	Target Tahunan	Realisasi TW III	% Capaian TW III	Realisasi s.d. TW III	% Capaian thdp target tahunan *)
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70%	70%	100%	120%	100%	120%

Sumber : Aplikasi siapmutu.kkp.go.id

\*) angka capaian mengacu pada perhitungan konversi pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, persentase sertifikat yang diterbitkan sebesar 100% dari total 10 permohonan dengan rincian 4 permohonan sertifikasi CBIB, 1 permohonan CPIB pemberian, dan 5 permohonan sertifikasi CPIB Kapal. Oleh karena itu atas ketiga unsur pembentuk tersebut, persentase hasil kelautan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Cirebon adalah  $(10/10) \times 100\% = 100\%$ , maka capaian IKU 1 terhadap target triwulan IV sebesar  $= (100/70) \times 100\% = 143\%$  (dengan konversi dalam aplikasi kinerjaku menjadi maksimal 120%).

Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 120% tersebut disebabkan mulai meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen para pelaku usaha perikanan dalam penjaminan

mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan pasar dagang produk perikanan yang semakin kompetitif baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi/sosialisasi pemahaman sistem jaminan mutu sebagai syarat dasar dalam usaha bidang perikanan dari tingkat hulu sampai tingkat hilir. Realisasi anggaran lingkup Kegiatan Pengawasan Mutu Produksi Primer triwulan IV sebesar Rp118.646.932,00 atau 99,85% dari pagu revisi terakhir senilai Rp118.200.000,00.

#### **IKU 2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Adapun target persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon selama satu tahun anggaran ini sebesar 70%, dengan rincian : target sertifikasi HACCP sebanyak 39 ruang lingkup dan SKP sebanyak 30 sertifikat.

Formula perhitungan IKU ini adalah :

$$\% X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

dengan keterangan :

% X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan untuk Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP  
 xn= Jumlah dari unsur pembentuk

Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 6. Capaian IKU 2 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan *)
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	70%	70%	100%	120%	99,23%	120%

Sumber : Aplikasi Honest dan SKP online

\*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pada bulan Oktober s.d. Desember 2025 persentase SKP yang diterbitkan sebanyak 33 sertifikat atau 100% dari total 33 permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dapat diterbitkan SKP, sedangkan untuk Sertifikasi HACCP yang terbit pada triwulan IV sebanyak 30 sertifikat dari total 30 permohonan untuk dilakukan sertifikasi. Oleh karena itu atas kedua komponen tersebut, persentase hasil kelautan perikanan pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah 100%, maka capaian IKU 2 sebesar  $(100 / 70) \times 100\% = 142,85\%$  (dikonversi aplikasi kinerjaku menjadi ~120%).

Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 120% tersebut disebabkan meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen para pelaku usaha perikanan dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan pasar dagang produk perikanan yang semakin kompetitif baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi/sosialisasi pemahaman sistem jaminan mutu sebagai syarat dasar dalam usaha bidang perikanan dari tingkat hulu sampai tingkat hilir. Realisasi anggaran lingkup Kegiatan Pengawasan Mutu Pascapanen triwulan IV sebesar Rp43.708.000,00 atau 97,57% dari pagu revisi terakhir senilai Rp44.797.000,00.

### **IKU 3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)**

Pengawasan mutu dimaksud meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan

melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, suplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah RI yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya. Kegiatan pengawasan mutu periode triwulan IV terlaksana di 1 lokasi sesuai target yaitu pada bulan Juli s.d. September 2025 di Kota Cirebon dengan 2 lokus (pasar tradisional dan pasar modern).

Formula perhitungan capaian IKU 3 adalah =

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A : Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI;

B : Jumlah kab/kota yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Tabel 7. Capaian IKU 3 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	1	1	1	100%	1	100%

Sumber : Laporan capaian kinerja triwulan IV. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Capaian IKU lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pascapanen triwulan IV 2025 seluruhnya adalah =  $(1/1)*100\% = 100\%$ ; sehingga capaian realisasi IKU =  $(100 / 70) *100\% = 120\%$ . Capaian terhadap target tahunan juga tercapai 120%.

Keberhasilan atas pencapaian yang melebihi target triwulan IV sebesar 120% didukung karena lebih intensifnya kegiatan monitoring dan surveilans di sentra-sentra penyediaan produk hasil perikanan domestik. Upaya nyata yang telah dilaksanakan SKIPM Cirebon antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring ikan sehat dan bermutu di sentra penyediaan pangan sehat domestik secara berkala. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik dilaksanakan sesuai arahan Pusat, namun tidak tersedia dukungan anggaran dalam RKA K/L TA 2025.

#### **IKU 4 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Formula perhitungan rasio ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon adalah (x) % =

$$\frac{A - B}{A}$$

dengan keterangan :

**x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)**

**A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP**

**B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan**

Periode pengukuran IKU 4 ini diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian IKU 4 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan *)
Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	99%	99%	100%	101%	100%	101%

Sumber : Laporan operasional ekspor hasil perikanan triwulan IV

\*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Jumlah permohonan sertifikasi ekspor hasil perikanan pada triwulan IV sebanyak 442 HC dan tidak terdapat notifikasi kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor, baik negara mitra maupun negara non mitra sehingga realisasi persentase ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon sebesar 100% dari target 99%. Keberhasilan capaian mencapai target kinerja 101% tersebut disebabkan kehati-hatian eksportir

dalam memenuhi persyaratan ekspor terkait penanganan produk oleh negara tujuan ekspor baik secara administrasi maupun *quality control* produk. Adapun upaya nyata yang telah dilaksanakan antara lain memberikan layanan dan edukasi pemahaman persyaratan ekspor komoditi hasil perikanan ekspor baik secara administrasi maupun *quality control* produk.

Dalam rangka pelayanan jasa HC mutu (kegiatan ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon dan mendukung pencapaian IKU 4 tersebut tidak tersedia dukungan anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

#### **IKU 5 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025. Penilaian ini menggambarkan sejauh mana laboratorium memenuhi persyaratan manajemen mutu dan memenuhi persyaratan teknis pengujian/kalibrasi, untuk menjamin kompetensi, ketelusuran hasil uji, dan keandalan data. Nilai dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar penilaian. Laboratorium dengan nilai pemenuhan tinggi menunjukkan bahwa sistem mutu berjalan efektif, hasil uji dapat dipertanggungjawabkan, dan kepercayaan pemangku kepentingan meningkat. ISO/IEC 17025 merupakan standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Formulasi perhitungan IKU 5 yaitu :

$$X = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)}{n}$$

X = nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (rata-rata )

X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, ..., X<sub>n</sub> = Nilai tingkat pemenuhan ke 1,2,3,...n

n = banyaknya tingkat pemenuhan

Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Capaian IKU 5 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV *)	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan *)
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75	75	93,89	120%	93,89	120%

Sumber : \*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Capaian IKU 5 atas target triwulan IV sebesar 120% (= 93,89/75 \*100%) dan capaian atas target tahunan sebesar 120%. Keberhasilan capaian kinerja IKU 5 ini diperoleh dari telah dilaksanakannya verifikasi langsung oleh tim Pusat Manajemen Mutu pada tanggal 21-24 April 2025. Beberapa faktor keberhasilan capaian tersebut adalah adanya komitmen pimpinan yang kuat dan berkelanjutan, Personel laboratorium memiliki kompetensi yang memadai, Dokumentasi sistem mutu yang lengkap dan terkendali, Penerapan audit internal dan tinjauan manajemen secara rutin, Proses pengujian dilaksanakan menggunakan metode yang tervalidasi/verifikasi, Identifikasi dan pengendalian risiko mutu dilakukan secara proaktif, Laboratorium secara konsisten memenuhi persyaratan akreditasi ISO/IEC 17025 serta regulasi teknis yang berlaku.

Upaya nyata yang telah dilaksanakan SKIPM Cirebon antara lain menerapkan sistem manajemen mutu bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, serta melakukan *continuous improvement*. Pada triwulan IV, realisasi anggaran atas Pengeluaran Sistem Manajemen Mutu Rp273.590.575,00 atau 99,75% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp274.280.000,00.

#### **IKU 6    Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap LI dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020, yang dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Nilai pemenuhan ini merupakan hasil penilaian terhadap tingkat kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi dalam memenuhi persyaratan standar yang berlaku (ISO/IEC 17020), yang mencakup aspek manajerial dan teknis, guna menjamin ketidakberpihakan, kompetensi, serta keandalan hasil inspeksi. Nilai ini diperoleh melalui proses evaluasi yang meliputi penelaahan dokumen sistem mutu, pelaksanaan audit/asesmen lapangan, kepatuhan

terhadap prosedur inspeksi, serta tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi perbaikan. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Formulasi perhitungan IKU 6 yaitu :

$$X = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)}{n}$$

X = persentase nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi (rata-rata)

X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, ..., X<sub>n</sub> = Nilai tingkat pemenuhan ke 1,2,3,...n

n = banyaknya tingkat pemenuhan

Perkembangan capaian IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian IKU 6 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan *)
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75	75	91,00	120%	91,00	120%

Sumber : \*) angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Capaian IKU 6 atas target triwulan IV sebesar 120% (= 91,00/75 \*100%) dan capaian atas target tahunan sebesar 120%. Keberhasilan capaian kinerja IKU 6 ini diperoleh dari telah dilaksanakannya verifikasi langsung oleh tim Pusat Manajemen Mutu pada tanggal 21-24 April 2025. Beberapa faktor keberhasilan capaian tersebut adalah komitmen manajemen puncak, Inspektor Mutu/ Asisten IMUT memiliki kualifikasi, pelatihan, dan sertifikasi sesuai ruang lingkup inspeksi, pengendalian dokumen dan rekaman berjalan efektif (versi terkendali), temuan audit internal ditindaklanjuti melalui tindakan korektif dan pencegahan yang terukur, pemeliharaan sarana prasarana terdokumentasi, menggunakan checklist, form, dan laporan inspeksi yang seragam. Upaya nyata yang telah dilaksanakan SKIPM Cirebon antara lain menerapkan sistem manajemen mutu bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, serta melakukan *continuous improvement*.

Pada triwulan IV, realisasi anggaran atas Penguatan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon sampai dengan triwulan IV mencapai Rp26.812.396,00 atau 99,97% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp26.820.000,00.

**SK 03**  
**Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan**  
**Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan**  
**Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

**IKU 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekonsiliasi LPJ, rencana kas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Periode pengukuran IKU setiap semester dan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 7 seperti pada tabel berikut.

Tabel 11. Capaian IKU 7 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	92	92	93,86	102%	93,86	102%

Sumber : Aplikasi OMSPAN KEMENKEU

Secara akumulasi, sampai dengan semester 2 TA 2025, nilai IKPA mencapai 93,86 dari target 92 atau capaian kinerja IKU 7 sebesar 102%. Keberhasilan tercapainya target tersebut disebabkan tercapainya kualitas perencanaan anggaran sebesar 96,39%; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 87,36%; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan Stasiun KIPM Cirebon dalam mencapai IKU tersebut antara lain berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan perencanaan anggaran sehingga penilaian indikator deviasi halaman III DIPA menjadi optimal. Sampai dengan triwulan IV realisasi anggaran komponen/kegiatan Layanan Umum dalam rangka mendukung capaian penilaian IKPA Tahun 2025 ini sebesar Rp43.469.225,00 atau 98,86% dari pagu anggaran setelah revisi terakhir sebesar Rp43.970.000,00.

## **IKU 8      Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), yaitu : Sangat Baik, apabila NKA > 90; Baik, apabila NKA >80 – 90; Cukup, apabila NKA >60 – 80; Kurang, apabila NKA >50 – 60; dan Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50. Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 8 seperti pada tabel berikut.

Tabel 12. Capaian IKU 8 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	71,5	71,5	92,5	120%	92,5	120%

Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Sampai dengan triwulan IV TA 2025, nilai kinerja perencanaan anggaran mencapai 92,50 atau capaian kinerja sebesar 120% dari target 71,5. Keberhasilan capaian IKU tersebut disebabkan optimalnya penyerapan anggaran, kesesuaian antara realisasi dan rencana anggaran, dan kepatuhan Stasiun KIPM Cirebon dalam menerapkan SBK sebagai pedoman penganggaran.

Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dengan mengupayakan menyusun perencanaan dengan matang, tidak melakukan revisi DIPA yang dapat menghambat/menunda pelaksanaan kegiatan, dan berupaya tidak adanya deviasi halaman III DIPA. Realisasi anggaran komponen/kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp20.445.395,00 atau 98,30% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp20.800.000,00.

## **IKU 9 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Formula perhitungan realisasi IKU = (Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon yang ditindaklanjuti : Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon) \*100%. Periode pengukuran IKU tahunan dan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 9 seperti pada tabel berikut.

Tabel 13. Capaian IKU 9 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas KKP

Terhadap LK KKP dan Stasiun KIPM Cirebon TA 2024 tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan oleh BPK RI, sehingga tidak terdapat rekomendasi temuan yang harus diselesaikan. Adapun atas rekomendasi temuan2 hasil pemeriksaan BPK RI tahun-tahun sebelumnya telah diselesaikan secara tuntas 100%. Keberhasilan capaian kinerja atas target tersebut didukung dengan telah dilaksanakannya tindak lanjut atas seluruh temuan kerugian negara sampai dengan saat ini sebesar 100% dengan status tuntas. Upaya yang dilakukan Stasiun KIPM Cirebon dalam mencapai IKU tersebut antara lain dengan konsisten melakukan sistem pengendalian intern untuk meminimalisir adanya temuan kerugian negara dan kelemahan SPI dalam pemeriksaan oleh BPK RI di lingkup UPT. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

## **IKU 10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam

melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Periode pengukuran IKU semesteran dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 10 seperti pada tabel berikut.

Tabel 14. Capaian IKU 10 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
IP ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	82	82	86,56	106%	86,56	106%

Sumber : <http://ropeg.kkp.go.id>

Pada semester II ini telah dilakukan pengukuran capaian IKU 10 menggunakan alat bantu berbasis digital <http://ropeg.kkp.go.id> dengan capaian IP ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon sebesar 86,56 dari target 82,00 sehingga capaian IKU sebesar 106%. Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan proaktifnya pegawai mencari informasi dan meningkatkan kompetensinya sebagai ASN, baik secara luring maupun daring. Upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Cirebon adalah menyusun rencana peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi secara berkala. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen anggaran secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

#### **IKU 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi Instansi Pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi anggaran (input) atau kegiatan (output) menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai atas penilaian mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Cara menghitung capaian nilai PM SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat mitra dari Unit Eselon I, namun jika Itjen KKP tidak melakukan penilaian terhadap UPT, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui

Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP. Periode pengukuran IKU semesteran dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 8 seperti pada tabel berikut.

Tabel 15. Capaian IKU 11 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (nilai)	86	86	88,2	103%	88,2	103%

Sumber : LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Dalam rangka implementasi sistem AKIP, telah disusun Manual IKU, Laporan Kinerja triwulanan dan LKj Tahunan. Capaian nilai mandiri sistem AKIP senilai 88,2 atau 104% dari target nilai 86,0. Keberhasilan tersebut disebabkan pada Tahun 2025, Stasiun KIPM Cirebon berusaha memenuhi dan mengimplementasikan sistem AKIP yang terakomodir pada seluruh aspek penilaian, mencakup aspek kepatuhan dalam menyediakan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi, mengukur capaian kinerja sesuai dengan pedoman, dan menyampaikan Laporan Kinerja baik kepada Pimpinan internal maupun eksternal (MENPAN dan RB melalui aplikasi ESR) secara tepat waktu.

Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi antar anggota tim akuntabilitas UPT baik perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi, rekonsiliasi dokumen, data dan informasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon secara berkala (triwulanan dan tahunan). Sampai dengan triwulan IV (setelah revisi anggaran) tidak terdapat anggaran komponen/kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal UPT untuk menunjang kegiatan SAKIP.

## **IKU 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada SKIPM Cirebon dihitung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan/LHP (terbatas pada Laporan Hasil Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit s.d. triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Stasiun KIPM Cirebon yang menjadi objek pengawasan oleh sistem dalam aplikasi SIDAK KKP. Capaian IKU diukur dengan membandingkan (jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP melalui Laporan Hasil Pengawasan) x 100%. Periode pengukuran IKU triwulanan dan

diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 12 seperti pada tabel berikut.

Tabel 16 Capaian IKU 12 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon (%)	85%	85%	100%	118%	100%	118%

Sumber : Data diolah dari aplikasi SIDAK. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pencapaian IKU dilakukan pada triwulan IV dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun KIPM Cirebon dan memanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Cirebon, sehingga capaian tindak lanjut mencapai 100% dari target 85%. Adapun bukti tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi PNBP di Stasiun KIPM Cirebon yang dilaksanakan Tim Itjen pada September 2025, telah seluruhnya *diupload* dan disampaikan ke Tim PTL Itjen melalui aplikasi pengawasan SIDAK. Sampai dengan triwulan IV, Stasiun KIPM Cirebon mampu memanfaatkan rekomendasi hasil pengawasan dimaksud sebagai perbaikan kinerja yang ditunjukkan dengan informasi data dalam aplikasi SIDAK. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 118% tersebut disebabkan rekomendasi hasil pengawasan 100% telah ditindaklanjuti secara tuntas untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon.

Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain memperbaiki kinerja pegawai dengan mengimplementasikan rekomendasi hasil pengawasan, seperti menatausaha dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

#### **IKU 13 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini

didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula perhitungan untuk mengukur IKU 13 Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = (Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP/ Pagu Pengadaan Barang/Jasa) x 100%. Periode pengukuran IKU triwulanan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Perkembangan capaian IKU 13 seperti pada tabel berikut.

Tabel 17 Capaian IKU 13 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP (%)	76%	76%	100%	131,6% (~120%)	100%	131,6% (~120%)

Sumber : Data dari aplikasi SIRUP. Angka capaian mengacu pada perhitungan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Realisasi IKU 13 Stasiun KIPM Cirebon pada triwulan IV sebesar 100%, sehingga capaian IKU 13 sebesar 132% yang selanjutnya dikonversi oleh aplikasi kinerjaku menjadi 120%, sebagaimana informasi dalam Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026, tanggal 13 Januari 2026, hal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan capaian IKU 120% tersebut disebabkan pasca efisiensi anggaran, PPK segera melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun, sehingga dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP melebihi 100%.

Upaya nyata yang telah dilakukan antara lain melakukan upload Rencana Umum Pengadaan UPT (pasca efisien) secara tepat waktu (sebelum jadwal/akhir Desember Tahun

2025). Dalam rangka pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

#### **IKU 14 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)**

Tujuan Pemantauan dan Penilaian Pembangunan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 yaitu untuk : (1) mengetahui perkembangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diseluruh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; (2) sebagai tahapan proses keberlanjutan komitmen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; (3) memberikan rekomendasi perbaikan dokumen pemenuhan LKE pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan memastikan bahwa indikator pembangunan Zona Integritas telah dilengkapi dengan bukti dukung memadai; (4) sebagai sumber data Capaian IKU Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT BPPMHKP. Ruang lingkup Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM meliputi :

##### **A. PENGUNGKIT (Pemenuhan dan Reform)**

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Tatalaksana
- 3) Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur
- 4) Penguatan Akuntabilitas
- 5) Penguatan Pengawasan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

##### **B. HASIL**

- 1) Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel; dan 2) Pelayanan Publik Yang Prima

Periode pengukuran IKU tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Penilaian capaian IKU dilaksanakan oleh Tim Penilai Sekretariat BPPMHKP. Adapun perkembangan capaian IKU 14 seperti pada tabel berikut.

Tabel 18 Capaian IKU 14 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70%	70%	83,05	118%	83,05	118%

Sumber : Surat Dinas Plt.Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor : B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026

Pada triwulan IV telah dilaksanakan penilaian pemenuhan dokumen Pembangunan ZI lingkup UPT dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan nilai capaian persentase pemenuhan sebesar 83,05% dari target 70% sehingga capaian IKU sebesar 118%. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 118% disebabkan komitmen seluruh pegawai Stasiun KIPM Cirebon dalam mengimplementasikan budaya pembangunan ZI. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah berusaha konsisten dalam mengimplementasikan klausul-klausul dalam seluruh area perubahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tidak hanya sebatas administrasi. Dalam rangka pencapaian IKU ini, tidak terdapat komponen pembiayaan secara khusus dalam RKA K/L TA 2025.

### **IKU 15 Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing-masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Periode pengukuran IKU triwulan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize*. Perkembangan capaian IKU 15 seperti pada tabel berikut.

Tabel 19 Capaian IKU 15 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahunan	Realisasi TW IV	% Capaian TW IV	Realisasi s.d. TW IV	% Capaian thdp target tahunan
Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Cirebon (indeks)	3,36	3,36	3,63	108%	3,63	108%

Sumber : <https://taplink.cc/vanblik.setbppmhkp> dan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUSAN) dengan alamat <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>

Pada triwulan IV telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah diprogramkan setiap triwulan menggunakan alat bantu kuesioner berbasis digital (website ptsp.kkp.go.id) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,63 dari target 3,36 sehingga capaian IKU sebesar 108%. Keberhasilan capaian IKU tersebut mencapai 108% disebabkan peningkatan pelayanan publik dan pemberian fasilitas layanan yang lebih memadai. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah berusaha konsisten dalam melayani masyarakat pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan prima. Sampai dengan triwulan IV realisasi anggaran untuk alat tulis kantor dan pelayanan publik dalam rangka mendukung capaian IKU 15 ini sebesar Rp11.993.800,00 atau 99,95% dari pagu anggaran sebesar Rp12.000.000,00.

### III. REALISASI RENCANA AKSI

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dilakukan evaluasi secara periodik, minimal triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana aksi pencapaian perjanjian kerja Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Kegiatan pendukung pencapaian IKU Tahun 2025 berjumlah sekitar 31 komponen/kegiatan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 15 IKU yang telah mencapai/melampaui target.

#### **IV. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN**

Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.585.116.904,00 atau 97,40% dari pagu anggaran revisi yang dikelola yaitu sebesar Rp9.841.258.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp256.141.096 atau 2,6%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 per akhir Desember yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar 93,86.

#### **V. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TA 2025 TERHADAP RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Stasiun KIPM Cirebon telah melakukan perbandingan capaian kinerja s.d. Triwulan IV Tahun 2025 terhadap target kinerja tahun 2025.

Berdasarkan target kinerja Tahun 2025 sebanyak 15 IKU, seluruh IKU ditargetkan dilakukan pengukurannya pada triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 4. Secara umum, 15 IKU yang dilakukan pengukuran tersebut telah mencapai/melebihi target yang ditetapkan. Hasil analisis terbatas terhadap IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan membandingkan terhadap target setahun pada TA 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan” (SK 1) dicapai dengan 4 IKU. Pada triwulan IV target IKU yang diukur sebanyak 4 IKU, yaitu :

IKU 1- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;

- IKU 2- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;
- IKU 3- Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 100%;
- IKU 4 - Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 101%.

Atas capaian 4 IKU pada triwulan IV diketahui bahwa capaian kinerja atas keempat IKU telah mencapai/melebihi target ( $\geq 100\%$ ) sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada tahun berikutnya.

2. Sasaran kegiatan “Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar” (SK 2) dicapai dengan 2 IKU. Pada triwulan IV kedua IKU yang diukur tersebut adalah :

- IKU 5- Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;
- IKU 6- Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;

Atas capaian 2 IKU pada triwulan IV diketahui bahwa capaian kinerja atas kedua IKU telah melebihi target ( $\geq 100\%$ ) sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada tahun berikutnya.

3. Sasaran kegiatan “Tata kelola pemerintahan Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan” (SK 3) dicapai dengan 9 IKU. Pada triwulan IV target IKU yang diukur 9 IKU seluruhnya, yaitu :

- IKU 7- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 102%;
- IKU 8- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, , dengan capaian kinerja 120%;
- IKU 9- Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 100%;
- IKU 10- Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 106%;

- IKU 11- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 103%;
- IKU 12- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 118%;
- IKU 13- Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 120%;
- IKU 14- Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerja 118%;
- IKU15- Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon, dengan capaian kinerjanya 108%.

Atas capaian 9 IKU tersebut pada triwulan IV diketahui bahwa hasil kinerja mencapai/ melebihi target, sehingga kinerja yang telah dihasilkan dapat dipertahankan/ditingkatkan pada tahun berikutnya.

# BAB IV

## PENUTUP

### I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Cirebon Triwulan IV Tahun 2025 menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Cirebon selama triwulan IV Tahun 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan pembandingan terhadap target triwulan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Stasiun KIPM Cirebon pada Triwulan IV Tahun 2025 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Manajemen Kinerja Stasiun KIPM Cirebon dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun KIPM Cirebon pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah Istimewa, dengan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)/Skor Kinerja IKU Triwulan III Tahun 2025 mencapai 113,48; demikian juga secara keseluruhan IKU sebesar 113,48 atau secara umum capaian kinerja di atas target sehingga kinerja perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.
2. Sebanyak 15 IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025, seluruhnya telah mencapai/melebihi target.
3. Kinerja anggaran Stasiun KIPM Cirebon TA 2025 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.585.116.904,00 atau 97,40% dari pagu anggaran revisi yang dikelola yaitu sebesar Rp9.841.258.000,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp256.141.096,00 atau 2,6%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 per akhir Desember yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dari Kementerian Keuangan sebesar 93,86.

### II. PERMASALAHAN

Pada proses pencapaian dan pengukuran capaian kinerja selama triwulan IV ini tidak ditemukan kendala yang berarti, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tercapainya target 15 IKU yang pengukurannya dijadwalkan pada triwulan IV. Adapun nilai IKPA triwulan IV yang tidak mencapai 100 dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan anggaran pada belanja kontraktual, yaitu nilai akselerasi kontrak hanya 50%. Hal tersebut disebabkan pada triwulan II akselerasi kontrak belum

didaftarkan ke KPPN-Kemenkeu, karena pagu anggaran pengadaan kontraktual baru dibuka blokir pada triwulan IV.

### **III. LANGKAH PERBAIKAN**

Pada TA 2026, Tim Program dan Keuangan akan berupaya meningkatkan capaian nilai IKPA tahun anggaran 2026 dengan mendaftarkan akselerasi kontraktual pada triwulan II sesuai dengan target yang ditetapkan.

# **LAMPIRAN**



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [setban.bkipm@kkp.go.id](mailto:setban.bkipm@kkp.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Rudi Barmara  
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ishartini  
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Cirebon



Ditandatangani  
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN CIREBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Lokasi)	1
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	82
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (%)	70
		15.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon (Indeks)	3,36

## Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9.453.341.000
2.	Manajemen Mutu	348.080.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	278.547.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025		10.079.968.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan Cirebon



Ditandatangani  
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara

# RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2025

STASIUN KIPM CIREBON



## **KATA PENGANTAR**

Kinerja suatu unit kerja/organisasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai prestasi atas pencapaian yang telah ditargetkan oleh unit kerja tersebut pada periode waktu tertentu. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan unit organisasi di lingkup KKP dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Oleh karena itu, untuk menyesuaikan tugas pokok dan fungsi yang baru terutama di bidang primer dan pasca panen disusunlah revisi rencana aksi kegiatan. Rencana aksi kegiatan ini diharapkan dapat memberikan panduan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan target kinerjanya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025 ini. Kami sangat berkenan jika ada masukan/saran yang membangun dalam rangka perbaikan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini, dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi yang berkepentingan.



Cirebon, 3 Februari 2025  
Kepala,

**R. Rudi Barmara, S.Pi, M.P.**  
**NIP 19690414 199203 1 005**

## RENCANA AKSI

## STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan	8,160,000	Sertifikat	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Sertifikasi CPIB pada Pemberian	8,160,000	Sertifikat	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Sertifikasi CPPIB	18,720,000	Sertifikat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Sertifikasi CPOIB dan CDOIB	18,720,000	Sertifikat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan	87,120,000	Sertifikat	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pasca Panen	Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan	30,000,000	Per센	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
			Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	43,280,000	Per센	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	3 Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pasca Panen	Perjalanan dinas pengambilan contoh uji	6,000,000	Laporan	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2
			Biaya uji banding ke laboratorium rujukan	4,100,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
			Belanja bahan dan perlengkapan pengawasan mutu hasil perikanan domestik	14,900,000	Paket	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen		Perjalanan investigasi kasus penahanan/penolakan produk perikanan	4,680,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				Sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI	56,720,000	Sertifikat	53	2	6	10	17	20	23	24	30	40	45	50	53
				Evaluasi kesesuaian penerbitan HC pada UPI	15,000,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Manajemen Mutu	Maintenance ISO 17025	30,500,000	Unit Kerja	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Uji Banding	5,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
					Uji Profisiensi	4,500,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
					Kalibrasi Alat Laboratorium	60,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Manajemen Mutu	Reakreditasi ISO 17020	35,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
					Sertifikasi ISO 9001	25,000,000	Unit Kerja	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Layanan perencanaan dan penganggaran	100,800,000	Laporan	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Layanan perencanaan dan penganggaran	100,800,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi	37,200,000	Laporan	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Perjalanan dinas Peningkatan Kualitas SDM	58,320,000	Orang	6	-	-	-	-	1	1	2	3	4	5	6
					Peningkatan Skill Komunikasi Petugas Pelayanan	67,400,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
					Inhouse Training Inspektorat Mutu	7,000,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi	37,200,000	Dokumen	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Satuan Output/Komponen	Target Output/Komponen	Target Output Bulanan											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
	12	Percentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi	37,200,000	Dokumen	4	-	-	1	1	1	2	2	3	3	3	4
	13	Percentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Pengelolaan PBJ	553,316,000	Laporan	7	-	-	1	1	4	4	4	5	5	6	7
	14	Percentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Dukungan Manajemen	Penilaian Mandiri SAKIP dan Maintenance WBK	14,760,000	Laporan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	Ketua Timja Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Bahan Perlengkapan Pelayanan	12,000,000	Laporan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengelolaan data dan informasi	25,080,000	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1



Cirebon, 3 Februari 2025  
Kepala SKIPM Cirebon

R. Rudi Barmara, S.Pi.,M.P.  
NIP. 19690414 199203 1 005